

Partisipasi Perempuan dalam Politik: Antara Representasi dan Kebijakan di Kota Ambon

Women's Participation in Politics: Between Representation and Policy in Ambon City

 <https://doi.org/10.30598/vol18iss2pp185-205>

Rican Tasane^{1*}

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

*tasanericans@gmail.com

Abstract

Women's participation in politics is a critical issue in democratic discourse, particularly in the context of representation and policy. This article aims to analyze the feminization process occurring in ten political parties in Ambon City during Indonesia's reform era. Using a qualitative approach, this study collects data from interviews, party statutes and bylaws (AD/ART), as well as documents from the Special Committee on the 2017 Election Bill (RUU Pemilu). The findings indicate that the feminization of political parties in Indonesia can be categorized into two forms: responsive and co-optive feminization. The level of feminization within political parties is influenced by three key factors: the number of women in party structures, the implementation of gender quota regulations, and the party's response to pro-women policies. This study finds that feminization within political parties in Ambon City remains limited, with a strong tendency towards representation but a negative response in terms of policy. Consequently, the feminization that occurs is more symbolic than a substantive transformation in policy-making. These findings contribute to the study of political feminization by highlighting local dynamics within the Indonesian political context, particularly in archipelagic regions. This research recommends the need for more progressive internal party policy reforms to ensure that women's increased involvement extends beyond structural representation to meaningful participation in political decision-making with broader impacts.

Keywords: *Feminization of Political Parties, Women's Political Participation, Gender Representation, Political Policy, Democratic Discourse*

Info Artikel

Naskah diterima: 03/07/2023

Revisi terakhir: 03/09/2023

Disetujui: 18/09/2023

Copyright © by the Authors

This work is licensed under Creative Commons Attribution
License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Keberadaan perempuan dalam struktur politik diharapkan tidak hanya sebagai representasi simbolis, tetapi juga sebagai aktor yang mampu memengaruhi proses pengambilan kebijakan secara substantif (Arnesen & Peters, 2018; Junk et al., 2021). Di berbagai negara, kebijakan afirmatif seperti kuota gender telah diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik (Morgenroth & Ryan, 2018; Okedele, 2021). Indonesia juga telah menerapkan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik dan parlemen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural (Hillman, 2018; Perdana & Hillman, 2020).

Di Kota Ambon, fenomena feminisasi partai politik mencerminkan pola yang lebih luas di tingkat nasional, di mana keterlibatan perempuan dalam partai politik cenderung bersifat simbolik dibandingkan substantif. Meskipun jumlah perempuan dalam kepengurusan partai mengalami peningkatan, posisi yang mereka duduki sering kali tidak berada dalam lingkaran inti pengambilan kebijakan (Izzati, 2019). Bahkan, beberapa partai hanya menempatkan perempuan sebagai alat elektoral untuk menarik suara pemilih tanpa memberikan mereka ruang strategis dalam pengambilan keputusan politik (Sallatu et al., 2019). Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi antara regulasi yang mewajibkan keterwakilan perempuan dan realitas politik yang masih bersifat maskulin.

Penelitian ini menjadi penting karena ingin mengeksplorasi lebih dalam sejauh mana proses feminisasi dalam partai politik di Kota Ambon benar-benar membuka akses bagi perempuan untuk berperan aktif dalam politik. Dengan memahami dinamika ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong representasi perempuan yang tidak hanya bersifat numerik, tetapi juga berdampak nyata pada kebijakan publik. Selain itu, kajian ini juga relevan dalam melihat bagaimana faktor sosial dan budaya lokal di wilayah kepulauan seperti Ambon memengaruhi pola feminisasi partai politik, sehingga dapat menjadi referensi dalam studi tentang gender dan politik di konteks lokal Indonesia.

Studi mengenai feminisasi partai politik telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian politik dan gender. Martin (2019) membedakan antara representasi deskriptif dan substantif, di mana yang pertama merujuk pada kehadiran perempuan dalam struktur politik, sedangkan yang kedua menyoroti sejauh mana perempuan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Akter (2020) juga menegaskan bahwa demokrasi yang inklusif seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada jumlah perempuan dalam politik, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan. Sementara itu, Engeli & Mazur (2018) dan Wojciechowska (2019) berpendapat bahwa kebijakan afirmasi, seperti kuota gender, sering kali menghasilkan representasi yang bersifat artifisial karena partai politik hanya sekadar memenuhi persyaratan tanpa ada upaya nyata untuk memberdayakan perempuan dalam politik.

Dalam konteks Indonesia, Collins (2019) dan Mlambo & Kapingura (2019) mengungkap bahwa meskipun kuota gender telah diadopsi dalam sistem kepartaian, realitasnya menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Perempuan yang masuk dalam kepengurusan partai sering kali tidak diberikan akses yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini diperkuat oleh temuan Prihatini (2019, 2020), yang menyebutkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah perempuan dalam partai politik, pengaruh mereka terhadap kebijakan partai tetap rendah. Dzuhayatin (2020) menambahkan bahwa faktor budaya dan sosial juga menjadi determinan dalam menentukan pola rekrutmen perempuan, yang sering kali lebih bergantung pada kedekatan dengan elite partai dibandingkan dengan kapabilitas individu.

Lebih jauh, beberapa penelitian telah mengkaji bagaimana partai politik merespons kebijakan afirmasi gender. Prajuli et al. (2021) dan Wardani & Subekti (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan feminisasi dalam partai politik sangat bergantung pada budaya politik internal partai dan tingkat komitmen elite politik terhadap kesetaraan gender. Dalam penelitian yang lebih spesifik mengenai Indonesia, Indarti et al. (2019) menemukan bahwa di daerah perkotaan dan kepulauan, feminisasi partai politik mengalami tantangan yang lebih kompleks. Meskipun aturan kuota diterapkan, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang tidak strategis, sehingga partisipasi mereka lebih banyak bersifat administratif daripada substantif.

Dalam konteks politik lokal di Indonesia, studi yang dilakukan oleh Dewanto (2020) dan Piscopo (2019) menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam partai politik di daerah sering kali hanya sebagai simbol representasi. Perempuan yang masuk dalam partai politik tidak diberikan pelatihan atau dukungan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam kebijakan publik. Jandevi (2019) juga menemukan bahwa mayoritas perempuan yang masuk ke dalam struktur kepartaian berasal dari latar belakang keluarga politisi atau memiliki hubungan dengan elite partai, yang menunjukkan bahwa akses perempuan dalam politik masih sangat bergantung pada jaringan sosial dibandingkan dengan meritokrasi.

Jika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak membahas feminisasi partai politik secara umum tanpa melihat secara spesifik bagaimana fenomena ini berkembang di daerah dengan karakteristik politik yang unik, seperti Kota Ambon. Di sinilah penelitian ini berkontribusi dengan memberikan gambaran lebih jelas mengenai bagaimana proses feminisasi berlangsung dalam partai politik di tingkat lokal, terutama dalam hal bagaimana partai merespons keterlibatan perempuan dalam kebijakan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek regulasi dan representasi, penelitian ini menyoroti bagaimana partai politik di Kota Ambon mengimplementasikan feminisasi, baik dalam struktur kepartaian maupun dalam kebijakan yang mereka hasilkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola feminisasi dalam partai politik di Kota Ambon dengan mengkaji perbedaan respons partai terhadap jumlah perempuan dalam struktur kepengurusan, penerapan aturan kuota, serta kebijakan yang berpihak pada perempuan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya memberikan pemetaan tingkat feminisasi partai di Kota Ambon, tetapi juga mengungkap sejauh mana feminisasi tersebut berdampak pada kebijakan yang lebih inklusif bagi perempuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan studi tentang feminisasi politik di Indonesia, khususnya dalam konteks politik daerah, serta memberikan wawasan bagi para pengambil kebijakan untuk mendorong keterlibatan perempuan yang lebih substansial dalam politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses feminisasi dalam partai politik di Kota Ambon. Pendekatan ini dipilih

karena fenomena feminisasi partai politik tidak hanya dapat diukur melalui angka atau statistik, tetapi juga perlu dianalisis melalui pengalaman, praktik, dan dinamika sosial yang terjadi di dalam partai. Sejalan dengan Denzin & Lincoln (2018), penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks dengan mempertimbangkan konteks dan interaksi sosial di dalamnya.

Kota Ambon dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika politik yang unik sebagai kota kepulauan yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Maluku. Sebagai kota dengan sejarah panjang dalam dinamika politik lokal, Ambon menghadirkan tantangan tersendiri bagi perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik. Selain itu, partai-partai politik di Kota Ambon telah mengalami berbagai proses adaptasi terhadap kebijakan nasional terkait keterwakilan perempuan, sehingga menarik untuk dikaji bagaimana feminisasi terjadi di tingkat lokal dan apakah partai politik di kota ini benar-benar memberikan ruang yang setara bagi perempuan dalam struktur kepartaian dan pengambilan kebijakan.

Penelitian ini melibatkan 15 informan kunci yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap feminisasi partai politik di Kota Ambon. Informan utama terdiri dari perempuan yang aktif dalam partai politik, elite partai, serta akademisi dan aktivis gender. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana perempuan berpartisipasi dalam politik kepartaian serta tantangan yang mereka hadapi dalam struktur pengambilan keputusan.

Sebanyak 10 perempuan yang aktif dalam partai politik menjadi informan utama dalam penelitian ini. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pengurus partai, kader, dan calon legislatif. Keberadaan mereka dalam penelitian ini sangat penting untuk memahami pengalaman langsung perempuan dalam menghadapi proses feminisasi dalam partai masing-masing. Dalam konteks Indonesia, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan dalam partai meningkat, posisi mereka dalam struktur partai sering kali masih terbatas pada peran administratif atau sebagai alat elektoral (Newman et al., 2022). Oleh karena itu, dengan mewawancarai perempuan yang terlibat langsung dalam partai, penelitian ini dapat mengungkap sejauh mana mereka memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dan bagaimana kebijakan afirmasi gender berdampak pada dinamika internal partai di Kota Ambon.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan tiga elite partai politik yang terdiri dari pimpinan atau tokoh senior dalam partai. Mereka memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan partai, termasuk terkait keterlibatan perempuan dalam kepengurusan dan pencalonan legislatif. Perspektif dari elite partai dapat memberikan pemahaman mengenai sejauh mana partai benar-benar berkomitmen terhadap kebijakan afirmasi gender dan apakah ada hambatan struktural yang menghambat perempuan untuk berperan lebih aktif dalam politik. Beberapa studi sebelumnya menegaskan bahwa kendala utama dalam feminisasi partai politik sering kali bukan hanya berasal dari aturan formal, tetapi juga dari budaya politik internal yang masih maskulin dan kurang mendukung kepemimpinan perempuan (Kurniawan & Astuti, 2021).

Untuk melengkapi analisis, penelitian ini juga melibatkan dua akademisi dan aktivis gender yang memiliki kepakaran dalam isu politik gender. Akademisi yang meneliti politik gender dapat memberikan sudut pandang teoretis dan analitis terhadap pola feminisasi partai politik di Kota Ambon, sedangkan aktivis perempuan yang bekerja dalam advokasi keterwakilan perempuan dapat memberikan gambaran tentang tantangan nyata yang dihadapi perempuan dalam politik lokal. Perspektif dari akademisi dan aktivis ini sangat penting untuk memahami apakah feminisasi partai politik yang terjadi di Kota Ambon bersifat substantif atau hanya sekadar pemenuhan kuota. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan afirmasi gender telah diterapkan di berbagai negara, keberhasilannya sangat bergantung pada faktor sosial, budaya, dan politik yang lebih luas (Choi, 2019).

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling (Patton, 2015), yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam dan relevan dengan fenomena yang diteliti. Teknik ini memungkinkan penelitian untuk menggali informasi dari individu yang benar-benar memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap isu feminisasi partai politik. Selain itu, jika diperlukan perspektif tambahan, penelitian ini juga menerapkan teknik snowball sampling, di mana informan awal dapat merekomendasikan individu lain yang dianggap memiliki wawasan berharga terkait dengan penelitian ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kombinasi beberapa teknik yang saling melengkapi guna memperoleh pemahaman yang holistik mengenai feminisasi partai politik di Kota Ambon. Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi partisipatif. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya mengungkap data kuantitatif terkait keterlibatan perempuan dalam politik, tetapi juga memahami secara kualitatif pengalaman mereka dalam struktur partai. Dengan demikian, penelitian ini dapat menggambarkan secara lebih mendalam bagaimana perempuan menghadapi tantangan dan peluang dalam dunia politik yang masih didominasi oleh laki-laki (Creswell & Creswell, 2018).

Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar informan memiliki keleluasaan dalam mengungkapkan pengalaman dan pandangan mereka mengenai feminisasi partai politik. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan tiga aspek utama, yaitu jumlah perempuan dalam struktur partai, implementasi aturan kuota gender, serta respons partai terhadap kebijakan yang mendukung kepentingan perempuan. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya memahami representasi substantif perempuan dalam politik, bukan sekadar kehadiran mereka dalam angka statistik (Collins, 2019; Mlambo & Kapingura, 2019). Wawancara dilakukan baik secara langsung maupun daring jika informan berada di luar kota, dengan durasi rata-rata 60–90 menit. Dengan metode ini, penelitian dapat menangkap kompleksitas pengalaman perempuan dalam struktur kepartaian, termasuk hambatan kultural dan struktural yang mereka hadapi dalam mengakses posisi strategis.

Selain wawancara, analisis dokumen juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Dokumen yang ditelaah mencakup Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

dari sepuluh partai politik di Kota Ambon, peraturan internal partai terkait keterlibatan perempuan, serta dokumen resmi seperti hasil pembahasan Panitia Khusus RUU Pemilu 2017 yang mengatur tentang kuota gender. Analisis dokumen ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan afirmasi gender diimplementasikan dalam struktur kepartaian dan apakah regulasi formal memiliki dampak nyata terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa di banyak negara, meskipun regulasi telah mengakomodasi keterwakilan perempuan, implementasinya sering kali masih bersifat simbolis tanpa memberikan akses yang lebih luas terhadap posisi pengambilan keputusan (Indarti et al., 2019; Wardani & Subekti, 2021). Oleh karena itu, analisis dokumen ini akan membantu mengungkap apakah pola serupa juga terjadi di Kota Ambon.

Untuk mendapatkan gambaran lebih nyata mengenai keterlibatan perempuan dalam dinamika internal partai, penelitian ini juga melakukan observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan politik, seperti rapat internal dan kegiatan sosialisasi yang melibatkan perempuan. Observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana perempuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan bagaimana peran mereka dalam praktik politik sehari-hari. Teknik observasi partisipatif memberikan keuntungan dalam menangkap dinamika sosial yang tidak selalu dapat diungkap melalui wawancara atau analisis dokumen (Engeli & Mazur, 2018). Dengan menghadiri langsung kegiatan partai, penelitian ini dapat mengamati interaksi antara perempuan dan elite partai, serta sejauh mana perempuan diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan mereka dalam forum politik.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data sebagaimana direkomendasikan oleh Creswell (2014). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, dokumen resmi, dan observasi guna memastikan konsistensi temuan. Jika ditemukan perbedaan antara pernyataan informan dan dokumen yang dianalisis, klarifikasi lebih lanjut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat. Selain itu, triangulasi metode diterapkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, sehingga temuan yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu metode saja, melainkan diperkuat oleh beragam pendekatan analitis. Sebagai langkah akhir, member checking dilakukan dengan mengonfirmasi temuan awal kepada beberapa informan untuk memastikan bahwa interpretasi data yang dilakukan sesuai dengan perspektif mereka. Langkah ini penting untuk meningkatkan kredibilitas penelitian dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh merepresentasikan realitas yang sebenarnya (Denzin & Lincoln, 2018).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Henglin et al. (2022), yang memungkinkan identifikasi pola-pola tematik dalam data kualitatif secara sistematis. Metode ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam memahami pengalaman dan perspektif informan serta memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap proses feminisasi partai politik di Kota Ambon. Melalui tahapan kodefikasi, identifikasi pola, dan interpretasi, penelitian ini berusaha

menggali bagaimana perempuan mengalami proses feminisasi dalam struktur partai serta bagaimana kebijakan internal partai merespons peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik.

Tahap pertama dalam analisis tematik adalah kodefikasi, di mana data yang diperoleh dari wawancara, dokumen, dan observasi dikategorikan berdasarkan tema utama yang muncul. Proses ini dilakukan dengan membaca ulang data secara berulang untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang relevan dengan tujuan penelitian. Tema yang ditemukan meliputi hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam partai politik, respons partai terhadap kebijakan feminisasi, serta dampak representasi perempuan dalam perumusan kebijakan. Kodefikasi ini memungkinkan pengelompokan data secara lebih sistematis sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih terstruktur (Ekoto et al., 2022).

Setelah kodefikasi selesai, tahap berikutnya adalah identifikasi pola. Pada tahap ini, berbagai respons dari partai politik dianalisis untuk menemukan kecenderungan umum dalam proses feminisasi partai. Identifikasi pola ini dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber guna melihat kesamaan dan perbedaan dalam respons yang diberikan oleh masing-masing partai. Beberapa pola yang dianalisis mencakup sejauh mana partai benar-benar mengakomodasi kebijakan afirmasi gender, apakah hambatan struktural lebih dominan dibandingkan faktor kultural, serta bagaimana perempuan yang telah berada dalam struktur partai menghadapi tantangan dalam menjalankan peran mereka. Temuan dalam tahap ini membantu memahami apakah feminisasi dalam partai politik hanya bersifat prosedural atau benar-benar membawa perubahan substantif dalam dinamika politik di Kota Ambon.

Tahap terakhir adalah interpretasi, di mana data yang telah terstruktur dianalisis lebih lanjut berdasarkan teori feminisasi politik dan relevansi dengan konteks politik di Kota Ambon. Dalam tahap ini, penelitian berupaya untuk tidak hanya menjelaskan temuan secara deskriptif, tetapi juga mengaitkannya dengan teori dan penelitian sebelumnya untuk memahami makna yang lebih dalam dari fenomena yang diamati. Interpretasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam partai politik. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan apakah feminisasi partai politik di Kota Ambon merupakan fenomena yang berkembang secara organik atau lebih banyak didorong oleh regulasi yang bersifat top-down.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kategorisasi Feminisasi: Responsif vs. Kooptif

Partisipasi perempuan dalam partai politik di Kota Ambon menunjukkan pola yang kompleks. Meskipun terdapat peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam struktur kepartaian, hal ini tidak serta-merta berimplikasi pada peningkatan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa feminisasi partai politik di Kota Ambon dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu feminisasi responsif dan feminisasi kooptif. Feminisasi responsif merujuk pada kondisi di mana partai politik secara aktif membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam struktur

organisasi dan pengambilan kebijakan. Partai dengan karakteristik feminisasi responsif tidak hanya memenuhi aturan kuota gender secara administratif, tetapi juga berupaya memastikan bahwa perempuan memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan partai. Ketua Perempuan Partai X di Ambon menjelaskan bahwa peran perempuan dalam partainya tidak terbatas pada pencalonan legislatif semata. Mereka juga dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan serta strategi kampanye. Selain itu, partai tersebut secara rutin mengadakan pertemuan yang secara khusus membahas agenda perempuan.

Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa partai dengan model feminisasi responsif cenderung memiliki perempuan yang menduduki posisi strategis dalam kepengurusan, seperti ketua bidang atau sekretaris jenderal partai di tingkat daerah. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan diberi peran dalam pembuatan manifesto politik partai. Temuan ini sejalan dengan konsep feminisasi substantif yang dikemukakan oleh Bucior & Sica (2019), di mana keberadaan perempuan dalam politik bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal pengaruh mereka dalam pembentukan kebijakan.

Di sisi lain, feminisasi kooptif merujuk pada partai politik yang hanya menampilkan perempuan dalam struktur kepartaian sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, namun tanpa memberikan ruang yang berarti bagi mereka untuk berperan aktif. Dalam konteks ini, perempuan sering kali hanya dijadikan alat untuk memenuhi kuota tanpa memiliki pengaruh nyata dalam keputusan politik.

Seorang kader perempuan dari Partai Y mengungkapkan bahwa meskipun terdapat kuota perempuan, keberadaan mereka dalam partai sering kali hanya dianggap sebagai pelengkap. Dalam rapat-rapat strategis, suara mereka cenderung diabaikan, sementara keputusan kebijakan tetap didominasi oleh laki-laki. Observasi di beberapa kantor partai politik di Ambon juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat perempuan dalam daftar kepengurusan, keterlibatan mereka lebih bersifat administratif dibandingkan dengan pengambilan keputusan strategis. Fenomena ini mencerminkan konsep feminisasi simbolik yang dikemukakan oleh Forman-Rabinovici & Sommer (2019), di mana perempuan secara numerik ada dalam struktur politik, tetapi kehadiran mereka tidak berbanding lurus dengan keterlibatan dalam proses kebijakan. Dari kedua kategori ini, penelitian menemukan bahwa sebagian besar partai politik di Kota Ambon masih cenderung berada pada tahap feminisasi kooptif. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam partai belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari penguatan demokrasi substantif.

Untuk memahami dinamika feminisasi di Kota Ambon lebih lanjut, penelitian ini melakukan pemetaan terhadap sepuluh partai politik yang aktif di wilayah ini. Analisis dilakukan berdasarkan tiga indikator utama, yaitu jumlah perempuan dalam struktur partai, implementasi aturan kuota, dan respons partai terhadap kebijakan pro-perempuan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa hanya dua dari sepuluh partai yang memiliki kecenderungan feminisasi responsif. Kedua partai ini tidak hanya memenuhi kuota 30%, tetapi juga memberikan posisi strategis kepada perempuan dan memiliki agenda kebijakan yang jelas terkait isu perempuan. Sementara itu, delapan partai lainnya lebih menunjukkan pola

feminisasi kooptif, di mana perempuan diakomodasi dalam kepengurusan, tetapi dengan peran yang terbatas. Seorang pengamat politik lokal di Ambon mengungkapkan bahwa meskipun secara struktural terdapat kemajuan dalam representasi perempuan di partai politik, dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan masih terasa kuat. Hanya sedikit partai yang benar-benar memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam proses tersebut.

Temuan ini juga sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Aspinall et al. (2021) di tingkat nasional, yang menunjukkan bahwa mayoritas partai politik di Indonesia masih memandang feminisasi sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai bagian dari strategi politik yang inklusif. Namun, terdapat perbedaan unik dalam konteks Kota Ambon, yakni keberadaan norma budaya yang masih kuat memengaruhi tingkat penerimaan terhadap perempuan dalam politik. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa dalam beberapa partai, perempuan yang berhasil mendapatkan posisi strategis umumnya memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan elite partai. Hal ini menunjukkan bahwa faktor patronase masih berperan besar dalam proses feminisasi politik di tingkat daerah.

Berdasarkan analisis ini, penelitian ini menemukan bahwa feminisasi partai politik di Kota Ambon masih bersifat setengah hati. Meskipun ada peningkatan jumlah perempuan dalam struktur kepartaian, belum ada transformasi yang signifikan dalam peran mereka dalam pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, untuk mencapai feminisasi politik yang lebih substantif, diperlukan upaya lebih lanjut dalam reformasi internal partai dan perubahan paradigma dalam politik kepartaian.

Representasi Perempuan dalam Partai Politik: Dari Representasi Simbolik hingga Representasi Substansial

Feminisasi dalam partai politik di Kota Ambon tidak terjadi dalam ruang hampa. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi sejauh mana partai politik membuka ruang bagi perempuan, baik dalam hal representasi maupun keterlibatan dalam pengambilan kebijakan. Tiga faktor utama yang menentukan tingkat feminisasi partai di Kota Ambon adalah jumlah perempuan dalam struktur kepartaian, implementasi aturan kuota gender, dan respons partai terhadap kebijakan pro-perempuan.

Salah satu indikator utama feminisasi partai politik adalah keberadaan perempuan dalam struktur kepartaian, terutama di posisi strategis. Meskipun banyak partai telah memenuhi kuota minimal perempuan dalam kepengurusan, kenyataannya sebagian besar dari mereka masih menempati posisi yang kurang strategis. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hanya sekitar 20% perempuan di partai politik Kota Ambon yang menduduki posisi penting, seperti ketua partai di tingkat daerah, sekretaris jenderal, atau ketua bidang kebijakan. Mayoritas perempuan lainnya ditempatkan di bidang sosial atau penguatan kader perempuan, yang secara struktural memiliki pengaruh terbatas dalam pengambilan keputusan utama partai.

Seorang kader perempuan dari Partai Z mengungkapkan bahwa meskipun dirinya terlibat dalam kepengurusan partai, posisi yang diberikan kepada perempuan masih

cenderung berada di bagian yang kurang strategis. Sementara itu, keputusan-keputusan besar tetap didominasi oleh laki-laki. Temuan ini selaras dengan konsep descriptive representation dari Lindqvist et al. (2021), yang membedakan antara representasi simbolik (keberadaan perempuan dalam struktur partai tanpa pengaruh yang signifikan) dan representasi substansial (keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan). Di Kota Ambon, representasi perempuan masih lebih banyak bersifat simbolik, di mana keberadaan mereka di dalam struktur partai tidak selalu berarti mereka memiliki kekuatan dalam menentukan arah kebijakan partai.

Observasi di beberapa kantor partai menunjukkan bahwa meskipun nama perempuan tercantum dalam daftar kepengurusan, dalam praktiknya mereka jarang terlibat dalam pertemuan-pertemuan strategis. Dalam beberapa kasus, ada partai yang hanya mencantumkan nama perempuan dalam kepengurusan untuk memenuhi syarat administratif dalam verifikasi partai.

Indonesia telah menetapkan kebijakan kuota gender 30% dalam partai politik sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterwakilan perempuan. Namun, bagaimana aturan ini diimplementasikan di tingkat daerah, khususnya di Kota Ambon? Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar partai di Kota Ambon telah memenuhi ketentuan kuota gender secara administratif. Namun, dalam implementasinya, banyak dari perempuan yang masuk dalam struktur partai masih belum diberikan peran yang signifikan.

Seorang anggota Partai X menjelaskan bahwa meskipun kuota 30% untuk perempuan telah diterapkan, dalam praktiknya banyak perempuan hanya dimasukkan dalam daftar untuk memenuhi persyaratan. Namun, setelah itu, mereka tidak benar-benar diberdayakan atau diberikan peran yang signifikan dalam partai. Hal ini mencerminkan teori critical mass dari Yarram & Adapa (2021), yang menyatakan bahwa kehadiran perempuan dalam politik harus mencapai titik tertentu sebelum mereka dapat memberikan pengaruh nyata. Artinya, sekadar memenuhi kuota gender tidak cukup; harus ada strategi untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan peluang untuk terlibat dalam proses politik secara substansial.

Observasi di beberapa partai menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk mengajukan nama perempuan yang memiliki hubungan dengan elite partai, seperti istri atau kerabat tokoh partai. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun kuota gender telah mendorong peningkatan jumlah perempuan dalam politik, faktor patronase masih memainkan peran besar dalam proses rekrutmen politik di Kota Ambon.

Lebih lanjut, beberapa partai bahkan hanya memasukkan perempuan dalam daftar calon legislatif (caleg) tetapi tidak memberikan dukungan yang cukup untuk mereka dalam proses kampanye. Akibatnya, meskipun ada peningkatan jumlah perempuan yang dicalonkan dalam pemilu, tingkat keberhasilan mereka dalam memenangkan kursi tetap rendah.

Faktor terakhir yang menentukan tingkat feminisasi partai adalah bagaimana partai merespons kebijakan yang berpihak pada perempuan. Idealnya, feminisasi partai tidak hanya ditunjukkan dengan keberadaan perempuan dalam struktur partai, tetapi juga melalui

kebijakan-kebijakan yang mereka perjuangkan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas partai politik di Kota Ambon belum memiliki agenda kebijakan yang secara eksplisit mendukung kepentingan perempuan. Meskipun ada beberapa perempuan dalam kepengurusan partai, mereka sering kali tidak memiliki kekuatan politik yang cukup untuk memengaruhi kebijakan partai terkait isu perempuan, seperti kesejahteraan perempuan, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, atau pemberdayaan ekonomi perempuan. Seorang aktivis perempuan di Kota Ambon menyoroti pentingnya peran partai politik dalam tidak hanya melibatkan perempuan dalam kepengurusan, tetapi juga mengangkat isu-isu perempuan sebagai bagian dari agenda politik mereka. Namun, menurutnya, sebagian besar partai masih menganggap isu perempuan sebagai hal yang bersifat sampingan.

Konsep substantive representation dari Allen & Childs (2019) menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik seharusnya tidak hanya sebatas angka, tetapi juga harus berdampak pada perubahan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Namun, di Kota Ambon, keterlibatan perempuan dalam partai belum cukup kuat untuk mendorong kebijakan yang lebih progresif dalam hal kesetaraan gender. Observasi dalam pertemuan-pertemuan partai menunjukkan bahwa ketika isu perempuan diangkat, sering kali pembahasan tersebut tidak dianggap sebagai prioritas utama. Beberapa partai bahkan tidak memiliki program khusus yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan atau kebijakan inklusif gender. Dampaknya, partai-partai di Kota Ambon belum mampu menjadi agen perubahan yang signifikan dalam hal pengarusutamaan gender. Tanpa kebijakan internal yang mendukung perempuan, maka feminisasi partai politik tetap akan bersifat setengah hati, di mana perempuan ada dalam struktur partai tetapi tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan.

Feminisasi yang Setengah Hati: Antara Representasi dan Pengaruh dalam Kebijakan

Meskipun partai politik di Kota Ambon telah menunjukkan peningkatan dalam keterlibatan perempuan secara struktural, realitas menunjukkan bahwa feminisasi partai masih bersifat setengah hati. Perempuan memang semakin banyak menduduki posisi dalam kepengurusan partai dan daftar calon legislatif, tetapi peran mereka dalam menentukan kebijakan masih terbatas. Ada kecenderungan bahwa representasi perempuan lebih digunakan sebagai strategi politik daripada sebagai upaya nyata untuk mendorong perubahan dalam kebijakan.

Banyak partai politik di Kota Ambon yang telah menyesuaikan diri dengan aturan kuota gender dan memasukkan lebih banyak perempuan dalam struktur partai maupun daftar calon legislatif. Secara kasat mata, hal ini mencerminkan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Namun, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan perempuan lebih dominan dalam dimensi representasi struktural dibandingkan dalam dimensi pengambilan keputusan dan kebijakan. Seorang kader perempuan dari Partai Y mengungkapkan bahwa meskipun perempuan turut serta dalam kepengurusan, mereka sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan besar. Keputusan tetap dibuat oleh laki-laki, sementara perempuan hanya mengikuti hasil yang telah disepakati.

Fenomena ini selaras dengan konsep “window dressing” dalam politik gender, sebagaimana dijelaskan oleh Hu et al. (2019). Window dressing merujuk pada praktik di mana perempuan ditempatkan dalam posisi tertentu untuk memenuhi standar normatif atau regulasi, tetapi tanpa memiliki pengaruh nyata dalam pembuatan keputusan. Dalam konteks partai politik di Kota Ambon, keterlibatan perempuan lebih terlihat pada aspek pencalonan legislatif dan pengisian jabatan struktural, tetapi tidak dalam proses penyusunan kebijakan partai atau strategi politik jangka panjang.

Observasi dalam beberapa kegiatan partai menunjukkan bahwa perempuan yang masuk dalam kepengurusan sering kali diberikan peran administratif atau seremonial. Misalnya, dalam rapat-rapat strategis, suara perempuan jarang menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan partai. Bahkan, dalam beberapa partai, perempuan lebih banyak ditugaskan pada bidang sosial atau hubungan masyarakat, bukan dalam bidang yang berorientasi pada kebijakan dan strategi politik. Hal ini semakin memperjelas bahwa representasi perempuan dalam partai politik di Kota Ambon masih cenderung bersifat simbolik, bukan substantif. Jika tidak ada perubahan dalam pola kepemimpinan partai, maka feminisasi yang terjadi hanya akan menjadi angka di atas kertas tanpa dampak nyata dalam kebijakan politik yang lebih inklusif gender.

Salah satu hambatan terbesar dalam feminisasi politik yang lebih substantif di Kota Ambon adalah resistensi internal dalam partai politik terhadap kebijakan pro-perempuan. Struktur kepemimpinan yang masih didominasi oleh laki-laki sering kali menghambat upaya perempuan dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan mereka. Seorang anggota legislatif perempuan dari Partai W mengungkapkan bahwa meskipun perempuan dapat masuk dalam struktur partai, mereka sering menghadapi resistensi ketika mengusulkan kebijakan yang berkaitan dengan isu perempuan. Isu-isu tersebut masih kerap dianggap bukan sebagai prioritas utama.

Struktur patriarkal dalam partai politik menjadi salah satu penyebab utama sulitnya perempuan mendapatkan ruang yang cukup dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, teori *hegemonic masculinity* yang dikembangkan oleh Taylor (2022) menjadi relevan untuk memahami bagaimana dominasi laki-laki dalam politik terus bertahan dan menghambat feminisasi yang lebih substansial.

Hegemonic masculinity menjelaskan bahwa dalam lingkungan politik yang didominasi laki-laki, terdapat standar kepemimpinan yang mengutamakan karakteristik maskulin, seperti agresivitas, kontrol penuh atas keputusan, dan eksklusivitas dalam jaringan kekuasaan. Perempuan yang masuk ke dalam lingkungan ini sering kali dianggap sebagai "orang luar" yang perlu menyesuaikan diri dengan norma yang sudah ada, bukan sebagai agen perubahan yang dapat membentuk ulang norma tersebut.

Observasi dalam beberapa diskusi internal partai menunjukkan bahwa ketika perempuan mencoba mengangkat isu-isu terkait kesejahteraan perempuan, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, atau kesetaraan akses ekonomi, sering kali mereka menghadapi tantangan dari kolega laki-laki yang menganggap isu tersebut sebagai kurang

relevan atau tidak sesuai dengan agenda utama partai.

Sebagai contoh, dalam salah satu partai besar di Kota Ambon, terdapat inisiatif dari kader perempuan untuk mengusulkan program pelatihan kepemimpinan bagi perempuan muda. Namun, inisiatif ini tidak mendapat dukungan penuh dari pimpinan partai, dengan alasan bahwa program semacam itu tidak termasuk dalam prioritas politik partai saat ini. Akibatnya, meskipun ada kehadiran perempuan dalam partai, peluang mereka untuk mengubah kebijakan tetap terbatas. Situasi ini menguatkan temuan bahwa feminisasi partai politik di Kota Ambon lebih menonjol dalam aspek representasi, tetapi mengalami stagnasi dalam aspek pengaruh terhadap kebijakan. Tanpa perubahan dalam pola kepemimpinan dan budaya politik internal partai, perempuan tetap akan berada dalam posisi yang marginal dalam pengambilan kebijakan.

Dinamika Lokal dalam Feminisasi Politik: Kota Ambon dalam Konteks Kepulauan

Feminisasi politik tidak terjadi dalam ruang yang terisolasi, tetapi dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan geografis di mana politik itu berlangsung. Kota Ambon, sebagai ibu kota Provinsi Maluku, memiliki dinamika politik yang khas dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, terutama karena karakteristiknya sebagai daerah kepulauan. Struktur sosial yang masih kuat, norma budaya yang cenderung patriarkal, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan ekonomi bagi perempuan, menjadi faktor yang membentuk pola feminisasi politik di kota ini.

Budaya di Kota Ambon masih sangat dipengaruhi oleh sistem patrilineal dan norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, baik dalam keluarga maupun dalam politik. Meskipun ada kemajuan dalam representasi perempuan dalam struktur kepartaian, resistensi sosial terhadap kepemimpinan perempuan masih cukup kuat.

Seorang aktivis perempuan yang aktif dalam advokasi hak-hak politik perempuan di Kota Ambon mengungkapkan bahwa banyak perempuan sebenarnya memiliki kapasitas politik yang baik. Namun, ketika mereka mencoba maju, dukungan dari lingkungan sekitar masih lemah, karena masyarakat masih cenderung meyakini bahwa politik adalah ranah laki-laki.

Dalam teori *Political Opportunity Structure* yang dikemukakan oleh De Vries et al. (2021), disebutkan bahwa tingkat keterlibatan perempuan dalam politik sangat bergantung pada peluang yang diberikan oleh sistem sosial dan politik di sekitarnya. Jika norma sosial masih membatasi perempuan, maka meskipun ada kebijakan afirmatif seperti kuota gender, partisipasi perempuan tetap akan stagnan atau hanya terjadi secara simbolik.

Observasi di beberapa partai politik di Kota Ambon menunjukkan bahwa perempuan yang ingin maju dalam politik sering kali menghadapi hambatan yang berasal dari lingkungan sosial mereka sendiri. Beberapa perempuan yang diwawancarai menyebutkan bahwa mereka mengalami tekanan dari keluarga dan komunitas untuk tidak terlalu vokal atau aktif dalam dunia politik. Dalam beberapa kasus, keterlibatan perempuan dalam politik bahkan dianggap bertentangan dengan peran domestik yang secara tradisional melekat pada perempuan. Di sisi lain, struktur sosial berbasis komunitas adat di Ambon juga memengaruhi pola feminisasi

politik. Dalam sistem adat tertentu, kepemimpinan perempuan masih dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim. Ini berkontribusi pada terbatasnya jumlah perempuan yang berani maju sebagai calon legislatif atau pemimpin partai. Namun, ada juga beberapa komunitas yang lebih terbuka terhadap kepemimpinan perempuan, terutama dalam konteks organisasi sosial dan keagamaan. Kendati demikian, ada beberapa perempuan yang berhasil masuk dalam politik karena memiliki latar belakang keluarga yang kuat di dunia politik atau mendapatkan dukungan dari jaringan aktivis perempuan. Namun, fenomena ini tetap menjadi pengecualian, bukan norma yang meluas.

Untuk memahami apakah fenomena feminisasi politik di Kota Ambon memiliki pola khas dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, perlu dilakukan perbandingan dengan penelitian feminisasi politik di wilayah lain, baik di daerah perkotaan maupun di wilayah marginal lainnya. Penelitian feminisasi politik di daerah lain menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik sering kali memiliki kemiripan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik lokal. Studi yang dilakukan oleh Choi (2019) tentang feminisasi politik di daerah marginal menunjukkan bahwa perempuan di wilayah terpencil atau kepulauan sering kali mengalami hambatan tambahan karena keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan yang lebih rendah, serta minimnya jaringan politik yang mendukung mereka.

Perbandingan dengan wilayah perkotaan lain di Indonesia, seperti Jakarta atau Surabaya, menunjukkan bahwa perempuan di kota-kota besar memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan politik dan sumber daya kampanye, serta lebih banyak organisasi yang mendukung keterlibatan mereka. Di Jakarta, misalnya, ada lebih banyak inisiatif dari organisasi masyarakat sipil yang mendukung perempuan untuk terjun ke dunia politik. Sementara itu, di Ambon, dukungan semacam ini masih terbatas dan lebih banyak bertumpu pada inisiatif individu.

Namun, ketika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia bagian timur, seperti Papua atau Nusa Tenggara Timur (NTT), feminisasi politik di Ambon bisa dikatakan relatif lebih maju. Beberapa partai politik di Ambon setidaknya telah menerapkan kebijakan afirmatif dalam bentuk kuota gender dan memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam struktur kepartaian. Ini berbeda dengan beberapa wilayah di Papua, di mana partisipasi perempuan dalam politik masih lebih rendah karena faktor adat dan geografis yang lebih menantang.

Dalam konteks ini, feminisasi politik di Kota Ambon berada di persimpangan antara kemajuan yang ditunjukkan dalam aspek representasi dan hambatan yang masih muncul dalam aspek substantif. Di satu sisi, ada kemajuan dalam jumlah perempuan yang terlibat dalam partai, tetapi di sisi lain, pengaruh mereka dalam pengambilan kebijakan masih terbatas. Seorang politisi perempuan dari Kota Ambon mengungkapkan bahwa meskipun jumlah perempuan di dunia politik semakin bertambah, tantangan terbesar yang dihadapi adalah sejauh mana mereka benar-benar memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan di partai.

Melewati Batas Simbolisme: Mendorong Gender Mainstreaming dalam Partai Politik

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam reformasi internal partai adalah gender mainstreaming, yaitu strategi yang memastikan bahwa perspektif gender diintegrasikan ke dalam semua kebijakan, program, dan praktik organisasi, termasuk dalam politik (Arora-Jonsson & Sijapati, 2018). Dengan gender mainstreaming, partai politik tidak hanya memastikan keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi, tetapi juga mengubah cara kerja partai agar lebih responsif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan. Seorang anggota legislatif perempuan di Kota Ambon mengungkapkan bahwa perempuan dalam politik masih sering dianggap sebagai pelengkap dalam struktur partai. Meskipun kuota telah terpenuhi, pengambilan keputusan strategis tetap didominasi oleh laki-laki, sehingga perjuangan untuk kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan masih menghadapi tantangan besar.

Dari observasi terhadap beberapa partai politik di Kota Ambon, terlihat bahwa meskipun ada perempuan yang menduduki jabatan dalam kepengurusan partai, banyak keputusan kunci tetap dibuat oleh elite laki-laki. Struktur patriarkal dalam partai masih sangat kuat, sehingga perempuan yang berada di dalamnya sering kali tidak memiliki ruang yang cukup untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan. Bahkan dalam forum-forum internal partai, perempuan sering kali lebih berperan sebagai pendukung daripada sebagai pengambil keputusan utama.

Konsep gender mainstreaming dalam politik, sebagaimana dikemukakan oleh Arora-Jonsson & Sijapati (2018), menekankan pentingnya reformasi internal partai dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi perempuan. Reformasi ini tidak hanya terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam kepengurusan, tetapi juga mencakup perubahan dalam struktur organisasi, budaya politik, serta integrasi isu-isu pro-perempuan dalam kebijakan partai. Ketiga aspek ini menjadi kunci dalam mengurangi ketimpangan gender yang masih terjadi dalam partai politik, terutama di Kota Ambon, di mana keterlibatan perempuan masih sering terbatas pada peran administratif dibandingkan peran strategis.

Dalam aspek perubahan struktur organisasi, partai politik perlu memastikan bahwa perempuan tidak sekadar mengisi posisi formal dalam kepengurusan, tetapi juga memiliki akses yang lebih luas terhadap pengambilan keputusan strategis. Hambatan struktural yang menghalangi perempuan untuk maju dalam kepemimpinan harus dihapuskan, salah satunya dengan menyediakan mekanisme mentoring bagi kader perempuan agar mereka lebih siap untuk bersaing dalam kompetisi politik internal. Selain itu, sistem rekrutmen partai harus lebih inklusif dengan membuka peluang yang sama bagi perempuan untuk berkembang sebagai pemimpin, sehingga representasi perempuan dalam partai bukan hanya sebatas simbolis, tetapi juga memiliki pengaruh nyata dalam perumusan kebijakan.

Perubahan budaya politik juga menjadi tantangan utama dalam proses feminisasi partai politik. Banyak partai di Kota Ambon masih mempertahankan budaya politik yang eksklusif dan maskulin, di mana perempuan sering kali ditempatkan dalam peran-peran administratif yang lebih bersifat pendukung dibandingkan peran strategis yang memiliki

pengaruh dalam kebijakan partai. Oleh karena itu, partai perlu berupaya mengubah budaya internal mereka agar lebih terbuka terhadap partisipasi perempuan, misalnya dengan memastikan bahwa forum-forum diskusi dan pengambilan keputusan memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk menyuarakan pendapat mereka. Perubahan ini tidak hanya akan meningkatkan keterwakilan perempuan secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam dinamika politik internal partai.

Lebih jauh, partai politik harus menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam mengintegrasikan agenda pro-perempuan dalam kebijakan mereka. Reformasi tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah perempuan dalam kepengurusan, tetapi juga harus diikuti dengan advokasi terhadap kebijakan yang mendukung kepentingan perempuan. Isu-isu seperti perlindungan tenaga kerja perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender harus menjadi bagian dari agenda utama partai. Komitmen ini harus tercermin dalam platform kebijakan partai, sehingga tidak hanya menjadi retorika politik semata, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kehidupan perempuan di berbagai sektor.

Sebagai gambaran lebih konkret mengenai reformasi dalam struktur organisasi dan kebijakan partai politik terkait feminisasi, berikut adalah beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan dalam implementasi gender mainstreaming dalam politik tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Reformasi Gender Mainstreaming dalam Politik

Aspek Reformasi	Deskripsi
Perubahan Struktur Organisasi	Meningkatkan akses perempuan dalam pengambilan keputusan, menghapus hambatan struktural, serta menyediakan mekanisme mentoring dan rekrutmen yang lebih inklusif.
Reformasi Budaya Politik	Menciptakan budaya politik yang lebih terbuka dan inklusif, memastikan keterlibatan perempuan dalam diskusi dan pengambilan keputusan strategis.
Integrasi Agenda Pro-Perempuan dalam Kebijakan Partai	Mengadvokasi kebijakan yang mendukung perlindungan tenaga kerja perempuan, pemberdayaan ekonomi, serta pencegahan kekerasan berbasis gender.

Sumber: Analisis Penulis, 2023

Untuk memastikan bahwa reformasi gender dalam partai politik berjalan secara efektif, partai-partai di Kota Ambon dapat menerapkan berbagai langkah strategis yang bertujuan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik. Langkah-langkah ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah perempuan dalam kepengurusan, tetapi juga menitikberatkan pada pembentukan kebijakan dan mekanisme internal yang dapat memperkuat posisi perempuan dalam partai.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membentuk divisi khusus yang berfokus pada isu gender dan kesetaraan. Beberapa partai politik di Indonesia telah

mengadopsi model ini, di mana divisi tersebut berperan dalam memastikan bahwa kebijakan partai selalu mempertimbangkan perspektif perempuan. Keberadaan divisi ini tidak hanya memperkuat pengarusutamaan gender dalam internal partai, tetapi juga berfungsi sebagai wadah untuk membangun kapasitas kader perempuan agar lebih siap menghadapi kompetisi politik. Di Kota Ambon, inisiatif ini dapat menjadi strategi kunci untuk meningkatkan peran perempuan dalam kepemimpinan politik, sekaligus mempercepat transformasi budaya politik yang lebih inklusif.

Selain itu, penting bagi partai politik untuk mewajibkan pelatihan sensitivitas gender bagi seluruh kader dan pengurus partai. Salah satu tantangan utama dalam feminisasi politik adalah masih adanya stereotip gender yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik. Dengan adanya pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman mengenai kesetaraan gender, para kader—baik laki-laki maupun perempuan—akan memiliki perspektif yang lebih inklusif dan mendukung keterlibatan perempuan secara substansial. Pelatihan ini juga dapat membantu mengurangi bias gender dalam proses pengambilan keputusan di dalam partai.

Langkah strategis lainnya adalah menerapkan sistem kuota berjenjang dalam pengambilan keputusan internal partai. Saat ini, kuota gender 30% lebih banyak diterapkan dalam pencalonan legislatif, tetapi untuk memastikan dampaknya lebih luas, kuota ini perlu diperluas ke dalam kepengurusan partai, terutama dalam posisi strategis seperti ketua partai, sekretaris jenderal, dan tim perumus kebijakan. Dengan menerapkan sistem kuota di berbagai tingkat kepemimpinan, partai politik dapat menciptakan struktur organisasi yang lebih adil serta memberikan kesempatan lebih besar bagi perempuan untuk berperan dalam pembuatan kebijakan partai.

Lebih jauh, partai politik di Kota Ambon juga dapat membangun aliansi dengan organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Sinergi antara partai politik dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik, baik melalui advokasi kebijakan maupun melalui pendampingan bagi perempuan yang ingin berkiprah di dunia politik. Aliansi ini juga dapat berperan dalam mendorong implementasi kebijakan pro-perempuan serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan dampak positif bagi perempuan di tingkat akar rumput.

Untuk memberikan gambaran lebih sistematis mengenai langkah-langkah strategis dalam memperkuat keterlibatan perempuan dalam partai politik, berikut adalah tabel yang merangkum beberapa strategi utama yang dapat diterapkan.

Tabel 2 Langkah-Langkah Strategis dalam Memperkuat Keterlibatan Perempuan dalam Partai Politik

Strategi	Deskripsi
Membentuk Divisi Khusus untuk Gender dan Kesenjangan	Divisi ini berfungsi memastikan kebijakan partai mempertimbangkan perspektif perempuan serta membangun kapasitas kader perempuan.
Mewajibkan Pelatihan Sensitivitas Gender	Pelatihan ini bertujuan mengurangi stereotip gender dalam politik dan meningkatkan pemahaman kader mengenai pentingnya partisipasi perempuan.
Menerapkan Sistem Kuota Berjenjang	Kuota gender diterapkan tidak hanya dalam pencalonan legislatif, tetapi juga dalam kepengurusan internal partai, termasuk posisi strategis.
Membangun Aliansi dengan Organisasi Perempuan dan LSM	Sinergi dengan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat advokasi kebijakan serta mendukung perempuan yang ingin terlibat dalam politik.

Sumber: Analisis Penulis, 2023

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam politik di Kota Ambon masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang signifikan. Meskipun secara formal partai politik telah membuka ruang bagi keterwakilan perempuan, feminisasi yang terjadi lebih cenderung bersifat simbolik dibandingkan substantif. Dominasi laki-laki dalam struktur kepemimpinan partai serta pola kooptasi politik terhadap perempuan menjadi faktor utama yang membatasi pengaruh perempuan dalam pengambilan kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan perempuan dalam struktur partai lebih banyak dipengaruhi oleh regulasi kuota gender dibandingkan dengan dorongan internal partai untuk memberikan ruang bagi kepemimpinan perempuan. Kuota gender yang diimplementasikan belum sepenuhnya diikuti dengan upaya penguatan kapasitas perempuan dalam politik, sehingga peran perempuan sering kali masih terpinggirkan dalam keputusan strategis partai. Selain itu, respons partai terhadap kebijakan pro-perempuan masih bersifat reaktif dan belum menjadi agenda utama dalam platform politik mereka.

Dinamika politik lokal di Kota Ambon juga menunjukkan bahwa faktor budaya dan struktur sosial masyarakat kepulauan memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola partisipasi perempuan. Struktur politik yang masih didominasi oleh patronase dan jaringan elite laki-laki menjadi penghambat utama bagi perempuan untuk memperoleh posisi strategis dalam partai. Konsep feminisasi responsif, yang seharusnya mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam politik, belum sepenuhnya terwujud dalam konteks politik Kota Ambon. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa upaya meningkatkan feminisasi politik yang lebih substantif memerlukan reformasi internal partai yang lebih progresif, termasuk penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan, penerapan kuota gender yang lebih efektif, serta integrasi kebijakan pro-perempuan dalam agenda partai. Tanpa perubahan struktural

dan kultural yang mendukung, feminisasi politik di Kota Ambon berisiko tetap menjadi strategi elektoral semata tanpa dampak nyata terhadap kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akter, M. (2020). Women's Political Participation in Bangladesh Parliament : a Case Study Analysis of Women's Substantive Representation. In *Politische Teilhabe von Frauen im bangladeschischen Parlament : eine Fallstudien analyse zur inhaltlichen Vertretung von Frauen* (p. 53). Universität Bremen.
- Allen, P., & Childs, S. (2019). The Grit in the Oyster? Women's Parliamentary Organizations and the Substantive Representation of Women. *Political Studies*, 67(3), 618–638. <https://doi.org/10.1177/0032321718793080>
- Arnesen, S., & Peters, Y. (2018). The Legitimacy of Representation: How Descriptive, Formal, and Responsiveness Representation Affect the Acceptability of Political Decisions. *Comparative Political Studies*, 51(7), 868–899. <https://doi.org/10.1177/0010414017720702>
- Arora-Jonsson, S., & Sijapati, B. B. (2018). Disciplining Gender in Environmental Organizations: The Texts and Practices of Gender Mainstreaming. *Gender, Work & Organization*, 25(3), 309–325. <https://doi.org/10.1111/gwao.12195>
- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Bucior, C., & Sica, A. (2019). Sociology as a Female Preserve: Feminization and Redirection in Sociological Education and Research. *The American Sociologist*, 50(1), 3–37. <https://doi.org/10.1007/s12108-018-9395-z>
- Choi, N. (2019). Women's political pathways in Southeast Asia. *International Feminist Journal of Politics*, 21(2), 224–248. <https://doi.org/10.1080/14616742.2018.1523683>
- Collins, P. H. (2019). *The Difference That Power Makes: Intersectionality and Participatory Democracy BT - The Palgrave Handbook of Intersectionality in Public Policy* (O. Hankivsky & J. S. Jordan-Zachery (eds.); pp. 167–192). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98473-5_7
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5 (ed.)). Sage Publications.
- De Vries, C. E., Hobolt, S. B., & Walter, S. (2021). Politicizing International Cooperation: The Mass Public, Political Entrepreneurs, and Political Opportunity Structures. *International Organization*, 75(2), 306–332. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0020818320000491>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Sage Book.
- Dewanto, P. A. (2020). The Domestication of Protection: The State and Civil Society in Indonesia's Overseas Labour Migration. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 176(4), 504–531. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/22134379-bja10018>
- Dzuhayatin, S. R. (2020). Gender Glass Ceiling in Indonesia: Manifestation, Roots, and Theological Breakthrough. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(1), 209–240. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.209-240>

- Ekoto, C., Zubkov, P., & Asok, G. (2022). Qualitative data collection. *The SAGE Handbook of Qualitative Research in the Asian Context*, 345–363.
- Engeli, I., & Mazur, A. (2018). Taking implementation seriously in assessing success: the politics of gender equality policy. *European Journal of Politics and Gender*, 1(1–2), 111–129. <https://doi.org/10.1332/251510818X15282097548558>
- Forman-Rabinovici, A., & Sommer, U. (2019). Can the descriptive-substantive link survive beyond democracy? The policy impact of women representatives. *Democratization*, 26(8), 1513–1533. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1661993>
- Henglin, M., Claggett, B. L., Antonelli, J., Alotaibi, M., Magalang, G. A., Watrous, J. D., Lagerborg, K. A., Ovsak, G., Musso, G., Demler, O. V., Vasan, R. S., Larson, M. G., Jain, M., & Cheng, S. (2022). Quantitative Comparison of Statistical Methods for Analyzing Human Metabolomics Data. *Metabolites*, 12(6), 519. <https://doi.org/10.3390/metabo12060519>
- Hillman, B. (2018). The Limits of Gender Quotas: Women’s Parliamentary Representation in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(2), 322–338. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1368092>
- Hu, H., Dou, B., & Wang, A. (2019). Corporate Social Responsibility Information Disclosure and Corporate Fraud—“Risk Reduction” Effect or “Window Dressing” Effect? *Sustainability*, 11(4), 1141. <https://doi.org/10.3390/su11041141>
- Indarti, N., Rostiani, R., Megaw, T., & Willetts, J. (2019). Women’s involvement in economic opportunities in water, sanitation and hygiene (WASH) in Indonesia: Examining personal experiences and potential for empowerment. *Development Studies Research*, 6(1), 76–91. <https://doi.org/10.1080/21665095.2019.1604149>
- Izzati, F. F. (2019). The Problem of “Women’s Work” and the Idea of Work Democratization for the Liberating Empowerment of Women. *Jurnal Perempuan*, 24(2), 141. <https://doi.org/10.34309/jp.v24i2.319>
- Jandevi, U. (2019). Communication strategy to improve women’s political participation in Indonesia. *International Journal of Communication and Society*, 1(2), 68–81. <https://doi.org/10.31763/ijcs.v1i2.46>
- Junk, W. M., Romeijn, J., & Rasmussen, A. (2021). Is this a men’s world? On the need to study descriptive representation of women in lobbying and policy advocacy. *Journal of European Public Policy*, 28(6), 943–957. <https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1767179>
- Kurniawan, H., & Astuti, K. (2021). Perception of School Climate and Masculinity on Bullying Behavior. *Psycho Holistic*, 3(2), 45–50.
- Lindqvist, A., Sendén, M. G., & Renström, E. A. (2021). What is gender, anyway: a review of the options for operationalising gender. *Psychology & Sexuality*, 12(4), 332–344. <https://doi.org/10.1080/19419899.2020.1729844>
- Martin, D. J. (2019). Playing the Women’s Card: How Women Respond to Female Candidates’ Descriptive Versus Substantive Representation. *American Politics Research*, 47(3), 549–581. <https://doi.org/10.1177/1532673X18776622>
- Mlambo, C., & Kapingura, F. (2019). Factors influencing women political participation: The case of the SADC region. *Cogent Social Sciences*, 5(1), 1681048. <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1681048>
- Morgenroth, T., & Ryan, M. K. (2018). Quotas and affirmative action: Understanding group-based outcomes and attitudes. *Social and Personality Psychology Compass*, 12(3).

<https://doi.org/10.1111/spc3.12374>

- Newman, J., Patmisari, E., & Widianingsih, I. (2022). Policy analytical capacity and “Eastern” styles of policy analysis: evidence from West Java Province, Indonesia. *Policy Sciences*, 55(3), 469–485. <https://doi.org/10.1007/s11077-022-09470-6>
- Okedele, A. (2021). Women, Quotas, and Affirmative Action Policies in Africa. In O. Yacob-Haliso & T. Falola (Eds.), *The Palgrave Handbook of African Women’s Studies* (pp. 449–463). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28099-4_80
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th (ed.)). SAGE Publications.
- Perdana, A., & Hillman, B. (2020). Quotas and ballots: The impact of positive action policies on women’s representation in Indonesia. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 7(2), 158–170. <https://doi.org/10.1002/app5.299>
- Piscopo, J. M. (2019). The limits of leaning in: ambition, recruitment, and candidate training in comparative perspective. *Politics, Groups, and Identities*, 7(4), 817–828. <https://doi.org/10.1080/21565503.2018.1532917>
- Prajuli, W. A., Yustikaningrum, R. V., & Amurwanti, D. N. (2021). How gender socialization is improving women’s representation in Indonesia’s Foreign affairs: breaking the ceiling. *Australian Journal of International Affairs*, 75(5), 527–545. <https://doi.org/10.1080/10357718.2021.1893653>
- Prihatini, E. S. (2019). Women’s views and experiences of accessing National Parliament: Evidence from Indonesia. *Women’s Studies International Forum*, 74, 84–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.03.001>
- Prihatini, E. S. (2020). Islam, Parties, and Women’s Political Nomination in Indonesia. *Politics & Gender*, 16(3), 637–659. <https://doi.org/10.1017/S1743923X19000321>
- Sallatu, A. M., Rahmadani, N., Agussalim, N., & Boangmanalu, A. G. (2019). Ensuring the Women’s Political Agenda: A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 24(2), 125. <https://doi.org/10.34309/jp.v24i2.320>
- Taylor, Z. (2022). *Hegemonic Neoliberalism & Democracy: A Postmodern (neo) Marxist Approach to Democratic Amelioration*.
- Wardani, S. B. E., & Subekti, V. S. (2021). Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia’s 2019 Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 28–49. <https://doi.org/10.1177/1868103421991144>
- Wojciechowska, M. (2019). Towards Intersectional Democratic Innovations. *Political Studies*, 67(4), 895–911. <https://doi.org/10.1177/0032321718814165>
- Yarram, S. R., & Adapa, S. (2021). Board gender diversity and corporate social responsibility: Is there a case for critical mass? *Journal of Cleaner Production*, 278, 123319. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123319>